

DAFTAR BACAAN

BUKU

Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang*. Raja Grafindo: Jakarta, 2010.

Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2008

HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo, 2014

H.S. Salim. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014

Ilmar, Aminuddin. *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2010

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.

Supramono, Gatot. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012

Sutedi, Adrian. *Hukum Pertambangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan - Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.

Tatik Sri Djatmiati, Urip Santoso, dan Lilik Pudjiastuti, *Buku Ajar Hukum Perizinan*, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, 2005

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 29

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 165

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 993

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral Di Dalam Negeri Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 35

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK/011/2014 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 37

INTERNET

http://www.ima-api.com/index.php?option=com_content&view=article&i...n-ekspor-hasilkan-pro-kontra&catid=47:media-news&Itemid=98&lang=en

http://www.ima-api.com/index.php?option=com_content&view=article&i...n-pemurnian-perlu-diperjelas&catid=47:media-news&Itemid=98&lang=id

<http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/bisnis/14/03/12/n2bapv-pemerintah-uu-minerba-tidak-mengandung-larangan-ekspor>

<http://bisnis.liputan6.com/read/2033547/pemerintah-dinilai-melanggar-uu-minerba>

Bab III merupakan analisis dari rumusan masalah yang kedua yaitu Akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan kewajiban pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri. Di dalam bab III ini berisikan 2 pokok sub bab. Sub bab pertama, yaitu Pembangunan Unit Pengolahan dan Pemurnian Guna Melaksanakan Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian. Sub bab pertama ini di dalamnya terdapat beberapa sub sub bab, yaitu Kerja Sama Pengolahan dan Pemurnian di Dalam Negeri, dan Larangan Kerja Sama Bagi Penambang Yang Tidak Memiliki Izin Usaha Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan Khusus. Selain itu terdapat sub bab kedua, yaitu Sanksi Atas Pelanggaran Ketentuan Pengolahan dan Pemurnian di Dalam Negeri. Dalam sub bab kedua ini terdapat beberapa sub sub bab, yang terdiri dari Pejabat Yang Berwenang Menjatuhkan Sanksi, Jenis-Jenis Sanksi Administrasi Bagi Pelanggar Ketentuan Pengolahan dan Pemurnian di Dalam Negeri. Di dalam bab ini akan dijabarkan tentang akibat hukum manakala pengusaha tambang mineral melakukan pelanggaran terhadap ketentuan kewajiban pengolahan dan pemurnian di dalam negeri sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.

Bab IV merupakan bab penutup dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dan atau saran. Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan mengenai rangkaian penulisan seperti yang telah dijelaskan pada bab-bab yang sebelumnya, dan juga berisi tentang saran dari pemikiran penulis terhadap masalah yang dikaji.